



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa

# PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

## RENCANA AKSI KINERJA Tahun 2026

Jalan Talo  
Nomor 2,  
Desa Wayo.  
Kecamatan  
Taliabu Barat.  
Kabupaten  
Pulau Taliabu  
Provinsi  
Maluku Utara  
97794.  
[www.pn-  
bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id)



[www.pn-bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id)



[pnbobong06@gmail.com](mailto:pnbobong06@gmail.com)



Pengadilan Negeri Bobong



# **RENCANA AKSI KINERJA**

Tahun 2026

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II  
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo  
Kecamatan Taliabu Barat  
Kabupaten Pulau Taliabu  
Provinsi Maluku Utara 97794  
[pnbobong06@gmail.com](mailto:pnbobong06@gmail.com)



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II  
TAHUN 2026**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Bobong dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

*“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong Yang Agung “*

Dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bobong.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bobong.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bobong.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2026 mencantumkan program, kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II  
TAHUN 2026**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                         | TARGET CAPAIAN TRIWULAN |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                           | I                       | II   | III  | IV   |
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Moderen | 1.1 Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;                                                                                                          | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada pihak                                            | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ Amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak      | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                    | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                           | 82%                     | 82%  | 82%  | 82%  |
|    |                                                                                  | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif                                                                  | 85%                     | 85%  | 85%  | 85%  |
|    |                                                                                  | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                         | 20%                     | 20%  | 20%  | 20%  |
|    |                                                                                  | 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                    | 85%                     | 85%  | 85%  | 85%  |
|    |                                                                                  | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                                                                  | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)                                                                             | 100%                    | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                  | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)                                                                        | 100%                    | 100% | 100% | 100% |

| NO  | AKSI KEGIATAN                                                                      | JADWAL PELAKSANAAN |       |        |       | OUTPUT / KELUARAN                  | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                                     | ANGGARAN (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                    | TW I               | TW II | TW III | TW IV |                                    |                                       |                                                                              |               |
| 1.  | KIMWASMAT                                                                          | √                  | √     | √      | √     | Koordinasi                         | Program penegakan dan pelayanan hukum | Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | 10.270.000    |
| 2.  | Pendaftaran berkas perkara                                                         | √                  | √     | √      | √     | Perkara hukum perseorangan         |                                       | Perkara pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah timur         | 9.865.000     |
| 3.  | Penetapan hari sidang                                                              | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 3.000.000     |
| 4.  | Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan                              | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 1.100.000     |
| 5.  | Pemeriksaan di sidang Pengadilan                                                   | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 960.000       |
| 6.  | Pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa                       | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 550.000       |
| 7.  | Minutasi / upaya hukum                                                             | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 1.200.000     |
| 8.  | Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama                           | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 650.000       |
| 9.  | Penanganan perkara kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama                            | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       |                                                                              | 330.000       |
| 10. | Pos Bantuan Hukum                                                                  | √                  | √     | √      | √     | Layanan Bantuan Hukum perseorangan |                                       | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum                       | 24.000.000    |
| 11. | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) | √                  | √     | √      | √     | Perkara hukum perseorangan         |                                       | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara    | 720.000       |
| 12. | Pelaksanaan perkara Peradilan Umum sidang diluar gedung Pengadilan                 | √                  | √     | √      | √     |                                    |                                       | Sidang diluar gedung Pengadilan                                              | -             |

| NO | SASARAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                           | TARGET CAPAIAN TRIWULAN |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|
|    | STRATEGIS                                                       |                                                                                             | I                       | II   | III  | IV   |
| 2. | Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik           | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 3,82                    | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| 3. | Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 80,1                    | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
|    |                                                                 | 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01     | 97,2                    | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
|    |                                                                 | 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03     | 93,2                    | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|    |                                                                 | 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                              | 77                      | 77   | 77   | 77   |
|    |                                                                 | 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                              | 77                      | 77   | 77   | 77   |
|    |                                                                 | 3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja<br>Pengadilan                       | 3,30                    | 3,30 | 3,30 | 3,30 |



| NO | AKSI KEGIATAN                                 | JADWAL PELAKSANAAN |       |        |       | OUTPUT / KELUARAN              | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                   | ANGGARAN (Rp) |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                               | TW I               | TW II | TW III | TW IV |                                |                            |                                                                            |               |
| 1. | Dukungan manajemen Non Operasional Pengadilan | √                  | √     | √      | √     | Layanan umum                   | Program dukungan manajemen | Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama | 1.440.000     |
| 2. | Gaji dan tunjangan                            | √                  | √     | √      | √     | Layanan perkantoran            |                            |                                                                            | 7.349,165.000 |
| 3. | Operasional dan pemeliharaan kantor           | √                  | √     | √      | √     |                                |                            |                                                                            | 2.115.560.000 |
| 4. | Layanan pemantauan dan evaluasi               | √                  | √     | √      | √     | Layanan manajemen dan evaluasi |                            |                                                                            | 300.000       |
| 5. | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran     | √                  | √     | √      | √     | Layanan Saranan Internal       |                            | Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung                 | 41.001.000    |

Ditetapkan di Bobong  
Pada tanggal 5 Januari 2026

**Ketua Pengadilan Negeri Bobong,**



**Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.**  
NIP. 197701162002121004